

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR
54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

Margareta Yolan Puspita
NPM : 0871010029

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54
TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK

Disusun Oleh :

Margareta Yolana Puspita
NPM. 0871010029

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Sutrisno, SH.,M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Mas Anienda T.F, SH.,MH
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,

DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54
TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK

Disusun Oleh :

Margareta Yolan Puspita
NPM. 0871010029

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur

Tim Penguji :

1. Sutrisno, SH.,M.Hum
NIP. 1960212 198803 1 001 (.....)
2. Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM
NIP. 19620625 199103 1 001 (.....)
3. Subani, SH.,M.Si
NIP. 19510504 198303 1 001 (.....)

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54
TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK

Disusun Oleh :

Margareta Yolan Puspita
NPM. 0871010029

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur Pada tanggal 15 Mei 2012

Pembimbing I

Tim Penguji :
1.

Sutrisno, SH.,M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Sutrisno, SH.,M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Pembimbing II

2.

Mas Anienda T.F, SH.,MH
NPT. 3 7709 07 0223

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM
NIP. 19620625 199103 1 001

3.

Subani, SH.,M.Si
NIP. 19510504 198303 1 001

Mengetahui.
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM
NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Margareta Yolan Puspita
NPM : 0871010029
Tempat Tanggal Lahir : 16 Maret 1990
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Delta Sari Indah AT-17 Waru-Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN
2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK” dalam rangka memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Surabaya “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta
saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil
jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat)
maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan
(Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya
dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
Pembimbing Utama

Surabaya, 15 Mei 2012
Penulis

Sutrisno, SH.,M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Margareta Yolan Puspita
NPM. 0871010029

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada TUHAN Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK.

Meskipun telah penulis usahakan semaksimal mungkin untuk tidak membuat banyak kesalahan dalam menyusun skripsi ini, namun dalam kenyataannya tidak dapat dihindari. Dan penulis harapkan segala kekurangan dan kesalahan dapat disempurnakan untuk masa selanjutnya.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, SH.,M.Hum selaku Wadep I dan Dosen Pembimbing Utama Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs.Ec.Gendut Sukarno, MS selaku Wadep II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, SH.,M.Si selaku Kaprogdi sekaligus Dosen Wali yang selama ini

- memberikan motivasi serta masukan-masukan yang sangat membangun selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Fauzul Aliwarman, SHi.,M.Hum selaku Sesprogdi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
 6. Ibu Mas Anienda Tien.F, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang telah berkenan membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dengan meluangkan tenaga dan waktunya.
 7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
 8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
 9. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang telah membantu dalam proses penelitian tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 10. Kedua orang tua Stefanus Missi Asphari dan Maria Titin Yulianti, serta kakak dan adikku Ellywistin Citra Rini, ST, Christian Octo Pranata, SH, Grace Laras Stifani, Gabriella Farah Eillen Sahertian yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil untuk selesainya skripsi ini.
 11. My boy friend “ Satria Dany Ardiansyah, ST “ yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil untuk selesainya skripsi ini.
 12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa

Timur, Iwan Bogianto, SH, Nyoman Ari Febrina, SH, Nourma Dwi Wulandari, Dewa Ayu Yudhiandari, Dony Tri Laksono, dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, Mei 2012

Penulis

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Margareta Yolan Puspita
NPM : 0871010029
Tempat Tanggal Lahir : 16 Maret 1990
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN
2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK**

ABSTRAKSI

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada di antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang memacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Permasalahan Pengangkatan anak merupakan suatu permasalahan yang timbul dalam pengangkatan anak dan penyelesaian tentang pengangkatan anak.

Di samping itu, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah mengenai status anak dalam pengangkatan anak memiliki akibat hukum yang berbeda menurut hukum adat Jawa dan hukum Islam. Sedangkan akibat hukum dari pengangkatan anak yang lain adalah hak-hak anak angkat yang diadopsi.

Kata Kunci : Anak angkat, Perlindungan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.5.1 Pengertian Pengangkatan Anak (Adopsi).....	9
1.5.1.1 Secara Etimologi	9
1.5.1.2 Secara Terminologi.....	9
1.5.2 Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	12
1.5.2.1 Peraturan Hukum Pengangkatan Anak Belum Mencukupi....	12

1.5.2.2 Dasar Hukum Pengangkatan Anak	14
1.5.3 Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Barat (BW).....	16
1.5.4 Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Adat	18
1.5.5 Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam	22
1.5.6 Tujuan Dan Macam Pengangkatan Anak	27
1.5.7 Perbandingan Antara Staatsblad 1917 Nomor 129, Hukum Adat, Perundang-undangan dan Hukum Islam Dalam Pengangkatan Anak	29
1.5.8 Metode Pendekatan	34
1.5.9 Sumber Data.....	35
1.5.9.1 Bahan Hukum Primer	35
1.5.9.2 Bahan Hukum Sekunder	36
1.5.9.3 Bahan Hukum Tersier	36
1.5.10 Pengumpulan Data	36
1.5.11 Analisis Data.....	36
1.5.12 Sistematika Penulisan	37
BAB II. PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK	
2.1 Permasalahan Yang Timbul Dalam Pengangkatan Anak	39
2.2 Solusi Untuk Permasalahan Yang Timbul Akibat Pengangkatan Anak.....	46
BAB III. AKIBAT HUKUM ATAS PENGANGKATAN ANAK	
3.1 Status Anak Dalam Pengangkatan Anak	48
3.1.1 Status Anak Angkat Dalam Hukum Adat Jawa.....	48

3.1.2 Status Anak Angkat Dalam Hukum Islam	51
--------------------------------------------------	----

3.2 Hak-Hak Anak Angkat	55
-------------------------------	----

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	67
----------------------	----

4.2 Saran	69
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbandingan Pengangkatan Anak	29
------------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian

Lampiran 3 : Surat Ijin Adopsi

Lampiran 4 : Kutipan Akta Kelahiran

Lampiran 5 : Penetapan Pengadilan

Lampiran 6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang
Pengangkatan Anak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah amanat Tuhan yang harus senantiasa dipelihara. Apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, pada kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, bahkan menjadi korban kekerasan. Hidupnya tidak menentu, masa depan tidak jelas dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi hal ini, banyak upaya dilakukan salah satunya mengangkat anak.

Kelahiran anak dalam suatu perkawinan selalu dianggap merupakan salah satu syarat yang amat penting untuk terciptanya suatu keluarga yang “bahagia” baik pada masyarakat tradisional maupun modern. Bagi masyarakat arti anak dalam sebuah perkawinan justru dianggap lebih penting karena anak dianggap sebagai unsur penting bagi terciptanya keluarga bahagia, juga dianggap sebagai penerus keturunan, sebab tujuan perkawinan itu adalah meneruskan garis keturunan dari pihak kerabat yang melangsungkan perkawinan itu.

Jika dalam suatu perkawinan tidak diperoleh anak berarti tidak ada yang melanjutkan keturunan dan kerabatnya, yang dapat mengakibatkan punahnya kerabat tersebut. Oleh karena itu, orang akan melakukan cara apa saja dan mengorbankan biaya berapa saja untuk mendapatkan anak dalam

perkawinan, bahkan ada yang melakukan program bayi tabung. Walaupun telah berusaha secara maksimal sehingga pengangkatan anak (adopsi) dianggap sebagai jalan terakhir.

Pengangkatan anak yang lazim disebut adopsi (adoption) merupakan lembaga hukum yang dikenal sejak lama dalam budaya masyarakat Indonesia. Berbagai macam motif orang melakukan pengangkatan anak, mungkin hanya sebagai pemancing atau sebagai pelanjut keturunan atau untuk pemeliharaan karena didasarkan pada rasa belas kasihan atau karena alasan-alasan lain.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri itu terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilikan anak, usaha yang pernah mereka lakukan adalah mengangkat anak atau “adopsi”.

Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, kalau kita mempelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber yang berlaku di Indonesia, baik hukum Barat yang bersumber pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW), hukum adat yang merupakan ‘the living law’ yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun Hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat

Indonesia yang mayoritas mutlak beragama Islam.

Dalam BW tidak diatur tentang masalah adopsi atau lembaga pengangkatan anak. Dalam beberapa pasal BW hanya menjelaskan masalah pewarisan dengan istilah ‘anak luar kawin’ atau anak yang diakui (erkend kind).¹

Sedang menurut hukum adat terdapat keanekaragaman hukumnya yang berbeda, antara daerah satu dengan daerah lainnya, sesuai dengan perbedaan lingkaran hukum adat, seperti yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven “ di Indonesia terdapat 19 lingkaran hukum adat, sedang tiap-tiap rechtskring pun terdiri dari beberapa kukuban hukum. Dengan demikian tentunya akan terdapat beberapa perbedaan pada masing-masing daerah hukum di Indonesia, tentang masalah status anak angkat itu.”²

Dalam hukum Islam lebih tegas dijelaskan, bahwa pengangkatan seorang anak dengan pengertian menjadikannya sebagai anak kandung didalam segala hal, tidak dibenarkan. Hal ini sesuai dengan pembahasan Al Ustadz Umar Hubies dalam bukunya ‘Fatawa’. Hanya yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa larangan yang dimaksudkan adalah pada status pengangkatan anak menjadi anak kandung sendiri, dengan menempati status yang persis sama dalam segala hal.³

Tradisi pengangkatan anak yang memberi ststus anak angkat sama dengan anak kandung juga terjadi pada zaman sebelum dan awal Islam. Tradisi itu pernah pula dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum menerima kerasulannya. Kehadiran syariat Islam yang ditegaskan atas kebenaran dan kejujuran untuk membina masyarakat dengan landasan yang murni dan wajar dalam mengatur susunan keluarga berlandaskan hukum-hukum yang teliti secara tegas mengharamkan tradisi tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 4, ayat 5, dan ayat 40.

¹ Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm.1.

² Ibid hlm.2.

³ Ibid hlm.2.

QS Al-Ahzab Ayat 4 : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

QS Al-Ahzab Ayat 5 : “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

QS Al-Ahzab Ayat 40 : “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Pengangkatan anak seperti yang terjadi pada zaman jahiliah itu sudah lama dikenal dilingkungan penduduk Indonesia, baik dilakukan secara adat maupun secara formal menurut peraturan perundang-undangan. Kendati memperluas penerapan pengertian pengangkatan anak (adopsi) yang secara limitatif hanya untuk laki-laki, namun tidak ada substansi yang berubah terhadap status dan akibat hukum pengangkatan anak yang sama dengan anak kandung. Ironisnya, penduduk yang mayoritas beragama Islam pun sudah biasa

melakukan pengangkatan anak berdasar konsepsi pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 dengan segala akibat hukumnya.

Kesadaran beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah pengangkatan anak. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya sehingga berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.⁴

Dari apa yang dikemukakan di atas, maka jelaslah ketidaksinkronan dari tiga sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam BW tidak dikenal kedudukan anak angkat itu sendiri, tetapi khusus bagi orang-orang yang termasuk golongan Tionghoa, lembaga adopsi ini diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129.

Dalam hukum adat masih terdapat ketentuan-ketentuan yang beraneka ragam, namun demikian masih pula terdapat titik tautnya, sesuai dengan keekaan dari keanekaragaman budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam bentuk lambang Negara Indonesia. Dalam hukum Islam ada indikasi tidak menerima lembaga adopsi ini, dalam artian persamaan anak angkat dengan anak kandung.⁵

⁴ Mustofa Sy, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Kencana, Jakarta 2008, hlm.4.

⁵ Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan berarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang dimasing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Hal penting yang perlu digarisbawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.⁶

Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pemerintah maupun masyarakat.⁷

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.⁹

⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.xii.

⁷ Afnil Guza, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, Asa Mandiri, Jakarta, 2008, hlm. 13.

⁸ Ibid hlm. 14.

⁹ Ibid hlm. 14.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak ?
2. Bagaimanakah akibat hukum atas pengangkatan anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam pengangkatan anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya bagi masyarakat yang hendak melakukan pengangkatan anak.
2. Secara praktis, masyarakat dapat mengetahui tentang tata cara dalam pengangkatan anak.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Pengertian Pengangkatan Anak (Adopsi)

Pengertian tentang Adopsi , dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi.

1.5.1.1 Secara Etimologi

Adopsi berasal dari kata ‘adoptie’ bahasa Belanda atau ‘adopt’ (adoption) bahasa Inggris , yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut ‘tabanni’ yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan ‘mengambil anak angkat’. Jadi disini penekanannya pada persamaannya status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara literlijk, yaitu (adopsi) diover ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

1.5.1.2 Secara Terminologi

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi, antara lain :

Menurut Surojo Wignjodipuro, Adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹⁰

Menurut Hilman Hadikusuma, Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹¹

Menurut Mahmud Syaltut, seperti yang dikutip secara ringkas oleh Fachtur Rahman dalam bukunya ilmu waris, beliau membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu :

¹⁰ Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.5.

¹¹ Ibid hlm.5.

Pertama : Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Kedua : Yakni dipahamkan dari perkataan “tabanni” (mengangkat anak secara mutlak), menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.¹²

Menurut Soepomo adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.¹³ Menurut J.A. Nota seorang ahli hukum Belanda yang khusus mempelajari adopsi member rumusan bahwa adopsi adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.¹⁴

Akhirnya dari apa yang terurai diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai adopsi atau pengangkatan anak terdapat belum ada persamaan atau kesatuan arti. Secara garis besar adopsi dapat dibagi dalam dua pengertian :

- a. Adopsi atau pengangkatan anak dalam arti luas yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri

¹² Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.176.

¹³ Ibid hlm.176.

¹⁴ Ibid hlm.176.

- b. Adopsi atau pengangkatan anak dalam arti terbatas yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua angkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.

Meskipun ada yang membedakan antara pengertian adopsi dengan pengertian anak angkat, tapi hal ini hanyalah dilihat dari sudut etimologi dan sistem hukum negeri yang bersangkutan. Adopsi dalam bahasa Arab disebut *tabanni* mengandung pengertian untuk memberikan status yang sama, dari anak angkat sebagai anak kandung sendiri dengan konsekuensi ia mempunyai hak dan kewajiban yang persis sama pula. Sedang istilah anak angkat adalah pengertian menurut hukum adat, dalam hal ini masih mempunyai bermacam istilah dan pengertian, sesuai dengan keanekaragaman sistem peradatan di Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak (PP RI Nomor 54 Tahun 2007), ketentuan umum Pasal 1 menyebutkan :

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
4. Orang tua angkat adalah orang yang memberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
5. Lembaga pengasuh anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau

yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.

6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak.
8. Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di daerah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.¹⁵

1.5.2 Pengangkatan Anak (Adopsi) Menurut Perundang-Undangan

1.5.2.1 Peraturan Hukum Pengangkatan Anak Belum Mencukupi.

Sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, namun praktik pengangkatan anak ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 41 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa, dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Kenyataan yang demikian mengakibatkan anak

¹⁵ Afnil Guza, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, Asa Mandiri, Jakarta, 2008, hlm.2.

menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-Undang Pengangkatan Anak telah ditetapkan beberapa kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1984 proses kearah lahirnya undang-undang yang khusus membahas pengangkatan anak telah sedang berjalan, dan yang mengatur ketertiban praktik pengangkatan anak dilakukan dengan beberapa peraturan kebijakan-kebijakan pemerintah dan lembaga yudikatif, seperti SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983, dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2005.

Mahkamah Agung sendiri sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia, terutama pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata tidak mencukupi. Meskipun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, karena lembaga pengangkatan anak telah menjadi bagian dari kultur masyarakat dan telah menjadi kebutuhan masyarakat, maka praktik pengangkatan anak secara adat telah diterbitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebar di beberapa peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung.¹⁶

¹⁶ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.50.

1.5.2.2 Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan dan pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan atau pengangkatan anak yang menunjukkan perubahan, pergeseran dan variasi pada motivasinya.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa Mahkamah Agung sendiri sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata tidak mencukupi, namun ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, misalnya :

1. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdata atau BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
5. Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: "...Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam."
8. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.¹⁷

Pengaturan Pengangkatan Anak dalam perundang-undangan telah mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal diskriminasi laki-laki atau perempuan bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat. Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.¹⁸

Ada beberapa hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak yaitu :

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui,

¹⁷ Ibid hlm.54.

¹⁸ Mustofa Sy, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.17.

maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

4. Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
6. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

Namun demikian, pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang ada belum memadai, oleh karena itu pengaturan pengangkatan anak dalam sebuah undang-undang yang lengkap dan tuntas sangat diperlukan.

1.5.3 Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Barat (BW)

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) atau BW, kita tidak menemukan satu ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini, yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak diluar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam buku I BW bab XII bagian ketiga, Pasal 280 sampai 289, tentang pengakuan terhadap anak-anak diluar kawin.¹⁹

Adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam KUHPerd tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sendiri sangatlah lazim terjadi dimasyarakat, maka pemerintah

¹⁹ Mudris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 31.

Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini.

Pasal 5 Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur tentang siapa saja yang boleh mengadopsi, yaitu ayat (1) menyebutkan, bahwa seorang laki beristri atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena angkat, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya.²⁰

Yang menyangkut dengan masalah motif atau tujuan menadopsi tak ada satu pasal pun dikemukakan secara konkrit dalam Staatsblad 1917 nomor 129 ini. Hanya sebagai pedoman sebagai pembahasan dalam buku ini, bahwa yang boleh diangkat hanyalah anak laki-laki, sedang untuk anak perempuan dengan tegas pasal 15 ayat (2) mengemukakan :

“Pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akte autentik adalah batal karena hukum”. Menurut pasal 10, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akte notaris. Sedang yang menyangkut dengan masalah akibat hukum dari pengangkatan anak itu diatur dalam pasal 11, 12, 13 dan 14 Staatsblad 1917 nomor 129.

Pasal 11 mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama anak yang diangkat. Pasal 12,

²⁰ Ibid hlm.33.

menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Pasal 13, mewajibkan balai harta peninggalan untuk apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu, guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak yang diangkat itu. Kemudian pasal 14, suatu pengangkatan anak berakibat putusanya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri, kecuali :

1. Mengenai larangan kawin yang berdasar atas suatu tali kekeluargaan.
2. Mengenai peraturan Hukum Pidana yang berdasar pada tali kekeluargaan.
3. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka Hakim dan penyanderaan.
4. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi.
5. Mengenai bertindak sebagai saksi.

Dalam hubungannya dengan masalah pembatalan suatu adopsi hanya ada satu pasal yang mengatur, yaitu pasal 15 Staatsblad 1917 nomor 129 yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain dari pada dengan akte notaris, adalah batal dengan sendirinya. Kemudian pula ditentukan, bahwa pengangkatan anak dapat dibatalkan, apabila bertentangan dengan pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 ayat (2) dan (3) dari Staatsblad 1917 nomor 129 tersebut.²¹

1.5.4 Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Adat

Sesungguhnya adopsi atau keluarga buatan ini telah dikenal dan dilakukan diberbagai tempat dipermukaan dunia ini, baik pada masyarakat primitif maupun masyarakat yang sudah maju. Oleh sebab itulah tidak heran kalau terakhir ini banyak dikhawatirkan dari orang-orang tua, terutama di kota-kota besar terhadap anak-anak

²¹ Ibid hlm.37.

kecilnya, karena sudah banyak kejadian kasus pencurian anak untuk dijual ke luar negeri. Hal ini terbukti pada tahun 1981, ketika hilangnya anak yang bernama Kurniaty yang diculik oleh seorang wanita yang berinisial S.

Sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk pengangkatan anak ini, terutama di Indonesia sendiri yang juga mempunyai aneka ragam sistem peradatannya. Diseluruh lapisan masyarakat pengangkatan anak ini lebih banyak atas pertalian darah, sehingga kelanjutan keluarga tersebut tergantung kepadanya. Adapun harta kekayaan anak tersebut juga bergantung apakah pengangkatan tersebut berdasarkan hukum pertalian darah atau tidak. Demikian juga kedudukan anak tersebut dalam masyarakat, masih dipengaruhi oleh perlakuan dan pertimbangan tertentu.

Secara umum sistem hukum adat kita berlainan dengan Hukum Barat yang individualistis liberalistis. Menurut Soepomo, hukum adat kita mempunyai corak sebagai berikut :

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
2. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
3. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit.
4. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).²²

²² Ibid hlm.42.

Dengan demikian, khusus masalah anak angkat atau adopsi bagi masyarakat Indonesia juga pastilah mempunyai sifat-sifat kebersamaan antar berbagai daerah hukum, kendatipun tentunya karakteristik masing-masing daerah tertentu mewarnai kebhinekaan kultural suku bangsa Indonesia.

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam. Tetapi nampaknya diberbagai daerah yang masyarakat adatnya menganut agama Islam, masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak dimana si anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya. Bahkan karena sayangnya pada anak angkat pewarisan bagi anak angkat telah berjalan sejak pewaris masih hidup.

Sejauh mana anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya dapat dilihat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan seperti berikut :

1. Tidak mempunyai keturunan.
2. Tidak ada penerus keturunan.
3. Menurut adat perkawinan setempat.
4. Hubungan baik dan tali persaudaraan.
5. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.²³

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada anak lelaki sebagai penerus keturunan dilingkungan masyarakat patrilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan

²³ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.79.

dilingkungan masyarakat matrilineal, maka diangkatlah kemenakan bertali darah. Dikarenakan adat perkawinan setempat seperti berlaku di daerah Lampung antara wanita Lampung dengan orang luar daerah, didalam perkawinan memasukkan mantu, maka diangkatlah simenantu menjadi anak angkat dari salah satu kepala keluarga anggota kerabat, sehingga sisuami menjadi anak adat dalam hubungan bertali adat.²⁴

Kemudian dikarenakan rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan pada anak kemenakan, ahli family atau orang lain yang hidup susah, maka si anak diurus, dipelihara, disekolahkan dan sebagainya, maka terjadilah anak angkat yang berlaku diluar upacara adat resmi, sehingga merupakan hubungan yang bertali budi. Selanjutnya dikarenakan hubungan baik dan rasa persaudaraan di dalam pergaulan sehari-hari antara orang yang satu dan yang lain, atau juga dikarenakan kebutuhan tenaga kerja dalam usaha pertanian rumah tangga dan lain sebagainya, maka terjadilah anak angkat bertali emas.

Di berbagai daerah ada pengangkatan anak yang dilaksanakan dengan upacara adat besar yang disaksikan oleh tua-tua adat dan ada yang hanya diresmikan terbatas dalam keluarga dekat atau tetangga saja, dan ada pula yang hanya cukup dengan adanya pengakuan dari orang tua angkat dan nampak dalam kenyataan pergaulan rumah tangga sehari-hari.²⁵

²⁴ Ibid hlm.79.

²⁵ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.80.

Ketentuan mengenai batasan calon orang tua angkat dan calon anak angkat tidak ada ketentuan yang secara tegas mengaturnya. Ketentuan calon orang tua angkat disuatu daerah alih-alih berbeda dengan daerah yang lain. Misalnya, di daerah Kendari Sulawesi Tenggara dan Kolaka biasanya dilakukan oleh orang yang berstatus kawin atau pernah kawin, sedangkan di Kecamatan Leuwidamar Bandung, Brebes Jawa Tengah dan daerah Perindu Kalimantan Barat dapat dilakukan oleh orang yang berstatus kawin, pernah kawin, ataupun belum kawin. Sedangkan batasan calon anak angkat umumnya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun, di beberapa daerah yang masyarakatnya menganut sistem garis keturunan laki-laki (patrilineal) tidak bisa melakukan pengangkatan anak terhadap anak perempuan.²⁶

1.5.5 Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam

Pengangkatan anak dalam bahasa arab dikenal dengan istilah tabanni, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak. Pengangkatan anak dalam pengertian ini berakibat hukum pada putusanya hubungan nazab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, status anak angkat sama dengan status anak kandung dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya, serta berhak mewarisi.

²⁶ Mustofa Sy, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.15.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunah hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam.²⁷

Menjelang diterimanya Undang-undang Kesejahteraan Anak, yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak yang telah disahkan dan diundangkan tanggal 27 Juli 1979 (Lembaran Negara RI tahun 1979 nomor 32), telah terjadi pembicaraan serius dari berbagai fraksi, lebih-lebih dalam kaitan permasalahannya dengan eksistensi Hukum Islam ketika menyoroti yang berkenaan dengan adopsi dalam rancangan UU tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep adopsi dalam rancangan UU tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya.

QS Al-Ahzab 33:4 : “Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka.

²⁷ Ibid hlm.21.

QS Al-Ahzab 33:5 : “Itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa bagimu pada perbuatan khilafmu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.

Surat Al-Ahzab (33:4-5) tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu.
3. Panggilah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Dari ketentuan di atas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri.

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin terlantar dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah. Tidak boleh karena ada utang di balik batu dan hal-hal lainnya yang mengikat.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.²⁸

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling menolong sesamanya. Bagi yang kaya harus membantu yang tidak kaya, orang Islam harus berhati sosial, menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

Begitu pula halnya dengan masalah adopsi ini, dimana walaupun ajaran yang ada hanya mengatakan, bahwa Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak, sedang yang ada hanya kebolehan atau suruhan untuk memelihara dan pengangkatan anak. Namun dalam konteksnya dengan argumentasi diatas, dapatlah dikatakan adanya perkembangan dari ajaran tersebut menurut pandangan Hukum Islam yang diterapkan di

²⁸ Mudris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 54.

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil rumusan team Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam ‘Seminar Evaluasi Pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan untuk menyusun RUU tentang Anak Angkat yang dipandang dari sudut Hukum Islam sebagai berikut :

1. Lembaga pengangkatan anak tidak dilarang dalam Islam, bahkan agama Islam membenarkan dan menganjurkan dilakukannya pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
2. Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur dengan Undang-undang yang memadai.
3. Istilah yang dipergunakan hendaknya disatukan dalam perkataan ‘pengangkatan anak’ dengan berusaha meniadakan istilah-istilah lain.
4. Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tuanya dan keluarga orang tua angkat yang bersangkutan.
5. Hubungan keharta-bendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan untuk dalam hubungan hibah dan wasiat.
6. Dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat Hukum Adat kita mengenai pengangkatan anak hendaknya diusahakan agar tidak berlawanan dengan hukum agama.
7. Hendaknya diberikan pembatasan yang lebih ketat dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang asing.
8. Pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.²⁹

Satu inti pokok yang harus digaris bawahi dalam usaha pengayoman hukum Islam terhadap lembaga adopsi ini adalah manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan dan terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dengan batasan-batasan yang benar. Perwujudan dalam bentuk karya nyata ini

²⁹ Mudris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 56.

punya nilai ibadah, asal saja dilakukan semata-mata karena Allah dan dengan mengharapkan keridhaan-Nya.

1.5.6 Tujuan Dan Macam Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak ada bermacam-macam. Tujuan pengangkatan anak bagi orang Tionghoa sebagaimana diatur Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah untuk meneruskan keturunan laki-laki. Tujuan pengangkatan anak menurut hukum adat sangat variatif, sedangkan pengangkatan anak menurut perundang-undangan dan hukum islam bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua, pertama, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat, dan kedua, untuk kesejahteraan atau kepentingan yang terbaik bagi anak. Tujuan yang pertama, menekankan pada kepentingan orang tua angkat, dan tujuan yang demikian merupakan tujuan pengangkatan anak zaman dahulu. Kini, tujuan pengangkatan anak menekankan pada kepentingan terbaik anak seperti tujuan yang kedua.

Adapun macam pengangkatan anak akan diuraikan sebagai berikut :

1. Dilihat dari kewarganegaraan orang tua angkat dan anak angkat, pengangkatan anak dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (domestic adoption) dan pengangkatan anak antar negara atau pengangkatan anak

pengangkatan anak Internasional (intercountry adoptioan, interstate adoption). Domestic adoption adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNI terhadap anak angkat WNI, sedangkan intercountry adoption adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNI terhadap anak angkat WNA atau pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNA terhadap anak angkat WNI.

2. Dilihat dari keberadaan anak yang diangkat, pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal (private adoption), pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasi sosial (non private adoption), dan anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun organisasi sosial, misalnya anak yang ditemukan karena dibuang orang tuanya.
3. Dilihat dari akibat hukum pengangkatan anak, dalam kepustakaan hukum biasanya membedakan pengangkatan anak menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (adoptio plena) dan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (adoptio minus plena). Pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (adoptio plena) berakibat hukum putus sama sekali hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sedangkan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (adoptio minus plena), hubungan antara

anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus dalam hal tertentu, biasanya berkenaan dengan hak mewaris.³⁰

1.5.7 Perbandingan Antara Staatsblad 1917 Nomor 129, Hukum Adat, Perundang-undangan dan Hukum Islam Dalam Pengangkatan Anak

Uraian terdahulu diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengangkatan anak dan mengetahui persamaan dan perbedaan pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, hukum adat, perundang-undangan, dan hukum Islam. Untuk mengetahui perbandingan persamaan dan perbedaan dalam pengangkatan anak tersebut sebagaimana Tabel 1 berikut :

No	Unsur Pembanding	Staatsblad 1917 No. 129	Hukum Adat	Perundang-undangan	Hukum Islam
1	2	3	4	5	6
1	Calon orang tua angkat	Laki-laki Tionghoa berstatus kawin, duda, janda cerai mati (belum kawin)	Variatif antara laki-laki atau perempuan kawin, pernah atau belum menikah	Laki-laki atau perempuan kawin, pernah atau belum menikah	Laki-laki / perempuan kawin, pernah kawin / belum menikah
2	Calon anak angkat	Laki-laki Tionghoa / perempuan	Laki-laki / perempuan	Laki-laki / perempuan	Laki-laki / perempuan
3	Agama	Terbatas pada golongan Tionghoa	Tanpa memandang agama	Harus seagama	Harus sesama agama islam
4	Tujuan	Meneruskan keturunan (tujuan lainnya)	Variatif	Kepentingan terbaik bagi anak	Kepentingan terbaik bagi anak

³⁰ Mustofa Sy, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.43.

5	Hubungan dengan orang tua angkat dan orang tua kandung	Berubah status menjadi anak kandung orang tua angkat dan putus segala hubungan keperdataan berdasar keturunan karena kelahiran	Variatif	Tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya, tidak memutuskan hubungan darah	Tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya, tidak memutuskan hubungan darah atau nasib
6	Kewarisan	Saling mewarisi dengan orang tua angkat, putus dengan orang tua kandung	Variatif	Belum tegas mengatur, dapat dikaitkan dengan ketentuan tidak memutuskan hubungan darah	Tidak saling mewarisi dengan orang tua angkat, dapat wasiat wajibah, tetap saling mewarisi dengan orang tua kandung
7	Wali Nikah	Ayah angkat berstatus ayah kandung	Variatif	Tetap ayah kandung atau wali nasab	Tetap ayah kandung atau wali nasab
8	Hubungan mahram	Berlaku larangan perkawinan dengan orang tua angkatnya, selain dengan kerabat asal	Variatif	Belum tegas mengatur, dapat dikaitkan dengan ketentuan tidak memutuskan hubungan darah	Orang tua angkat bukan mahram anak angkat, tetap hubungan mahram dengan keluarga asal
9	Tata cara	Akta Notaris	Secara adat, kepengadilan kalau ada urgensi	Putusan atau penetapan pengadilan	Putusan/penetapan pengadilan
10	Pengadilan yang berwenang	Pengadilan Negeri	Pengadilan Negeri	Pengadilan agama dan pengadilan negeri	Pengadilan agama

Tabel 1
Perbandingan Pengangkatan Anak

Calon orang tua angkat menurut konsepsi pengangkatan anak (adopsi) Staatsblad 1917 Nomor 129, hukum adat, dan hukum Islam terdapat kesamaan mengenai orang yang boleh melakukan pengangkatan anak, yaitu laki-laki atau perempuan berstatus kawin, pernah kawin, atau belum kawin. Perbedaannya adalah calon orang tua angkat menurut konsepsi asli Staatsblad 1917 Nomor 129 yang berlaku terbatas untuk golongan Tionghoa saja dan tidak bisa dilakukan oleh orang yang belum kawin. Ketentuan itu diperluas oleh yurisprudensi sehingga dimungkinkan bagi orang yang belum kawin melakukan pengangkatan anak.. Menurut hukum adat, umumnya hanya boleh dilakukan oleh orang yang berstatus kawin atau pernah kawin, tetapi beberapa daerah memberikan peluang kepada orang yang belum kawin untuk melakukan pengangkatan anak. Menurut hukum Islam, calon orang tua angkat juga tidak menutup kemungkinan bagi orang yang belum kawin untuk melakukan pengangkatan anak dengan pertimbangan kemaslahatan.

Calon anak angkat menurut konsepsi Staatsblad 1917 Nomor 129 semula untuk laki-laki Tionghoa saja, tetapi berdasarkan yurisprudensi dapat pula mengangkat anak perempuan, sehingga calon anak angkat tersebut ada kesamaan dengan hukum adat, perundang-undangan, dan hukum Islam. Pengaturan pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 menekankan pada golongan Tionghoa saja. Pengangkatan anak menurut hukum adat tidak memandang perbedaan agama. Ketentuan perundang-undangan menentukan bahwa pengangkatan anak

harus seagama. Sedangkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam bagi sesama agama Islam tanpa memandang golongan.

Tujuan pengangkatan anak menurut konsepsi Staatsblad 1917 Nomor 129 semula untuk meneruskan keturunan, tetapi berdasarkan yurisprudensi dapat pula diajukan dengan tujuan yang lain. Menurut hukum adat, tujuan tersebut bervariasi, sedangkan menurut perundang-undangan dan hukum Islam bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak menurut hukum Islam, dapat dilihat dari sikap Nabi Muhammad SAW. Ketika memberikan kebebasan opsi kepada Zaid untuk memilih sesuai dengan kepentingan terbaik bagi Zaid, tetap bersama Nabi Muhammad SAW atau kembali kepada orang tuanya tanpa tebusan, dan Zaid memilih bersama Nabi Muhammad SAW. Karena ia merasakan kasih sayang dan pemeliharaan yang teramat baik.³¹

Menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, anak angkat berubah status menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya dan putus segala hubungan keperdataan berdasarkan keturunan karena kelahiran, sedangkan menurut perundang-undangan dan hukum Islam tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya karena pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah. Menurut hukum adat, hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan orang tua kandungnya cukup bervariasi.

³¹ Ibid hlm.43.

Menurut Staasblad 1917 Nomor 129, anak angkat dan orang tua angkat saling mewarisi dan terputus hubungan pewarisan anak angkat dengan orang tua kandungnya, sedangkan menurut hukum Islam anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi tetapi dapat menerima wasiat wajibah, dan anak angkat tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Hukum adat bervariasi. Sedangkan perundang-undangan belum tegas mengaturnya, tetapi secara implicit ketentuan tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung dan keluarga asalnya memberikan peluang tetap saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarga asalnya.

Apabila terjadi perkawinan bagi anak perempuan yang perkawinannya membutuhkan wali nikah dan pengangkatan anak itu dilakukan menurut konsepsi pengangkatan anak Staatsblad 1917 Nomor 129, maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah angkatnya karena ia berstatus ayah kandung. Sedangkan menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang bertindak sebagai wali nikah tetap ayah kandung atau wali nasab.

Pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 mengubah status anak yang diangkat menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya sehingga tidak boleh terjadi perkawinan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Menurut hukum Islam, hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya tetap bukan mahram, sehingga tidak ada larangan terjadi perkawinan antara orang tua angkat dengan anak

angkatnya, sedangkan hubungan mahram anak angkat tetap berlaku dengan orang tua kandung dan kerabat asalnya. Menurut hukum adat, meskipun ketentuan bervariasi, tetapi umumnya menutup kemungkinan terjadi perkawinan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Perundang-undangan belum tegas mengaturnya, tetapi dari ketentuan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak memutuskan hubungan darah berarti secara implisit berkaitan pula dengan ketentuan mahram.

Tata cara pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 melalui notaris, menurut hukum adat dilakukan secara adat dan ke pengadilan kalau ada urgensi, menurut perundang-undangan dan hukum Islam melalui putusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 dan hukum adat menjadi kewenangan pengadilan negeri, pengangkatan anak menurut perundang-undangan kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan agama, sedangkan pengangkatan anak menurut hukum Islam menjadi kewenangan pengadilan agama.³²

1.5.8 Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan maksud memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnyanya tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

³² Ibid hlm.48.

2007 secara efektif guna mencegah eksploitasi terhadap anak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari serta mengumpulkan data-data yang berupa Undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini.

Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah yaitu berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini.

1.5.9 Sumber Data

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan atau terdiri dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1.5.9.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari : Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.³³

a. Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

³³ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.31.

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

1.5.9.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.³⁴

1.5.9.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.³⁵

1.5.10 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang terkait dengan masalah, dipilih untuk dapat memberikan jawaban pada masalah yang dikemukakan tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengumpulan data tersebut dilaksanakan di Departemen Sosial Provinsi Jawa Timur dan data yang diperoleh antara lain, Persyaratan Untuk Mendapatkan Izin Adopsi Secara Langsung, Akta Kelahiran Anak Angkat dan Penetapan Putusan Pengadilan tentang Pengangkatan Anak.

1.5.11 Analisis Data

Pengelolaan data menggunakan metode deskriptif analisis, artinya data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data

³⁴ Ibid hlm.32.

³⁵ Ibid hlm.32.

primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.5.12 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun sistematika penulisan, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan untuk mempermudah dalam mempelajarinya. Penulisan skripsi terbagi menjadi empat bab yang saling berhubungan. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang masing-masing merupakan pembahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Dalam bab ini memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, pertanggung jawaban sistematika.

Bab kedua, menjelaskan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 54 Tahun 2007 Tentang Permasalahan Proses Pengangkatan Anak. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yang pertama adalah permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, yang kedua

adalah solusi untuk permasalahan-permasalahan yang timbul tentang Pengetahuan masyarakat yang lemah akan proses pengangkatan anak dan bukti penyerahan dalam proses pengangkatan anak.

Bab ketiga, berisi mengenai akibat hukum pengangkatan anak. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yang pertama mengenai status anak dalam pengangkatan anak, yang kedua masalah mengenai hak-hak anak angkat.

Bab keempat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas pembahasan pada bab dua dan bab tiga serta berisi saran-saran atas permasalahan yang dikaitkan dalam penulisan skripsi ini.